

## **Bab VI**

# **Pendidikan Guru Jarak Jauh**

## **(Kasus FKIP Universitas Terbuka)**

---

I G. A. K. Wardani, Udin S. Winataputra

---

### **A. Fungsi dan Satuan Pendidikan**

#### **1. Guru dan Pendidikan Guru**

Pendidikan guru merupakan suatu lembaga yang keberadaannya sangat diperlukan sepanjang masa, karena keberadaan guru memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sebuah bangsa. Guru merupakan aset besar sebuah bangsa yang ingin berkembang karena gurulah yang dianggap berperan penting dalam mengantarkan suatu bangsa menuju berbagai kemajuan dan meninggalkan berbagai keterpurukan. Konon kabarnya, ketika Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak dibom atom, hal pertama yang mendapat perhatian pemerintah Jepang adalah guru. Meskipun banyak faktor lain yang menyebabkan dalam waktu singkat Jepang maju pesat dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya, namun perhatian yang diberikan terhadap keberadaan guru perlu diperhitungkan sebagai salah satu sumber majunya negeri matahari terbit tersebut. Bertitik tolak dari cerita tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru harus mendapat perhatian yang memadai, jika negeri tercinta ini ingin maju seperti negara lainnya.

Pada awalnya, pendidikan guru berada pada dua jenjang, yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pada jenjang

pendidikan tinggi. Sejak jaman kemerdekaan sampai dengan awal tahun 60-an, pendidikan guru untuk sekolah dasar (SD) diselenggarakan dalam satu sekolah yang disebut Sekolah Guru B (SGB), yang mendidik tamatan sekolah rakyat (SR) selama empat tahun untuk menjadi guru SD. Seiring dengan berbagai pembaharuan, kualifikasi guru SD kemudian ditingkatkan dari lulusan SGB menjadi lulusan Sekolah Guru A (SGA), yang kemudian namanya diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Dengan ditingkatkannya kualifikasi guru SD dari lulusan SGB menjadi lulusan SGA/SPG, maka para guru yang sudah mengajar perlu meningkatkan pendidikannya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan tersebut adalah melalui kursus tertulis yang disebut Kursus Pendidikan Guru, yang memanfaatkan buku Himpunan Pelajaran yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan Guru (BPG) Bandung. Barangkali kursus tertulis ini dapat disamakan dengan pendidikan guru jarak jauh, yang ketika itu memang menggunakan bahan-bahan tertulis, pertemuan sewaktu-waktu, dan kemudian ujian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan guru jarak jauh ketika itu berfungsi meningkatkan kualifikasi dan kemampuan para guru yang sudah mengajar.

Pendidikan jarak jauh di berbagai negara memang menjalankan fungsi sebagai pendidikan guru, seperti halnya di Bhutan, Zambia, dan negara-negara lain di Afrika (Chivore, 1992), di samping fungsi utama lain yaitu pemberantasan buta huruf. Oleh karena itu, status dan fungsi pendidikan guru jarak jauh tidak dapat diabaikan karena memang memegang peran yang sangat penting bagi pendidikan guru, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan. Kebutuhan guru yang meningkat, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, membuat lembaga pendidikan guru konvensional (tatap muka) tidak mampu menghasilkan jumlah guru yang dibutuhkan. Kondisi seperti ini memaksa pemerintah melaksanakan "*crash program*", berupa pengangkatan guru kilat yang hanya dididik

selama dua minggu untuk mengajar di SD. Hal ini terjadi di Indonesia pada tahun 70-an. Tentu saja kondisi seperti ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan karena dapat menimbulkan masalah dalam berbagai aspek pendidikan, khususnya mutu pendidikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan para guru kilat ini perlu dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelatihan secara terprogram, pemberian kesempatan untuk melanjutkan studi, serta penataran secara insidental merupakan contoh-contoh upaya peningkatan kemampuan para guru yang sedang bertugas di lapangan.

## **2. Fungsi Utama Pendidikan Guru Jarak Jauh**

Sesuai dengan namanya, fungsi utama lembaga pendidikan guru jarak jauh adalah menyelenggarakan pendidikan guru dengan sistem belajar jarak jauh. Ini berarti, para mahasiswa yang mengikuti program ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbeda dengan pendidikan guru tatap muka yang menyiapkan calon guru yang berasal dari tamatan sekolah menengah, maka di Indonesia, pendidikan guru jarak jauh menerima mahasiswa yang sudah berstatus sebagai guru yang sedang aktif mengajar. Para guru ini tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya, karena pendidikan jarak jauh memang memungkinkan mereka belajar sambil mengajar.

Pendidikan guru jarak jauh di Indonesia, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT) mempunyai kaitan erat dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas guru. Khusus dalam peningkatan kualifikasi guru SD, hal ini bermula dari dihapusnya secara bertahap Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang merupakan sekolah yang menghasilkan calon guru sekolah dasar (SD). Sejak dihapusnya SPG, maka sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud nomor 0854/U/1989, tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah

Dasar, sejak tahun 1990, pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) berada di jenjang pendidikan tinggi, beralih dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Dalam surat keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa bagi guru SD yang sedang aktif mengajar dan belum memenuhi kualifikasi D-II, disediakan Program Penyetaraan D-II PGSD yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka bekerja sama dengan Ditjen Dikdasmen. Dengan demikian, pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, yang sebelumnya hanya mencakup pendidikan guru untuk SLTP dan SLTA, sejak tahun 1990 juga menangani pendidikan guru sekolah dasar.

Di luar negeri, seperti di Zimbabwe, pendidikan jarak jauh juga berfungsi sebagai pendidikan prajabatan bagi para calon guru. Hal ini terjadi karena tuntutan jumlah guru, terutama untuk sekolah dasar, jauh melebihi jumlah guru yang dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru konvensional (Chivore, 1992). Program pendidikan guru jarak jauh ini adalah: *The Zimbabwe Integrated National Teacher Education Course (ZINTEC)*. Sebagai pendidikan guru yang terintegrasi, ZINTEC bekerja sama dengan lima *Teacher College*. Mahasiswa ZINTEC mengambil kuliah di salah satu dari *Teacher College* tersebut pada awal dan akhir program, dan pada waktu-waktu tertentu di antaranya. Ketika para mahasiswa tidak mengambil kuliah di *Teacher College*, mereka ditugaskan mengajar di sekolah, dibantu dengan bahan ajar jarak jauh, dan disupervisi oleh para dosen dari *Teacher College*, di samping oleh kepala sekolah dan para pengawas pendidikan (Chivore, 1992). Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan guru jarak jauh perlu berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pendidikan guru, dan juga dengan lembaga yang mempekerjakan guru. Tanpa kolaborasi seperti itu, akan sulit bagi

pendidikan guru jarak jauh untuk menyelenggarakan pendidikan guru, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan.

### 3. Fungsi Pendidikan Guru pada FKIP Universitas Terbuka

Fungsi pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) lebih menekankan pada pendidikan dalam jabatan, bukan pada pendidikan prajabatan. Hal ini didasarkan pada hakikat dari pendidikan jarak jauh yang sesuai dengan kondisi para guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi. Pendidikan jarak jauh yang dapat berlangsung tanpa mengenal batas-batas ruang, waktu, serta latar belakang budaya dan sosial ekonomi, membuat pendidikan guru jarak jauh menjadi pilihan utama bagi para guru yang sedang aktif bertugas di sekolah. Jauhnya tempat mengajar para guru dengan lembaga pendidikan guru tatap muka, terbatasnya waktu para guru untuk mengikuti pendidikan tatap muka, serta terbatasnya kondisi ekonomi para guru, merupakan kendala utama dalam meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan guru tatap muka. Bagaimanapun juga, terlepas dari kondisi tempat mereka bertugas, setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional, dan sekaligus berhak, bahkan wajib, meningkatkan kualifikasi sesuai dengan tuntutan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pada saat ini, pendidikan guru jarak jauh memainkan peran yang sangat potensial dalam peningkatan kualifikasi guru.

Komitmen yang ditunjukkan oleh FKIP-UT untuk menyelenggarakan program *dalam jabatan* merupakan kesepakatan tidak tertulis yang juga dilandasi oleh kenyataan tuntutan pendidikan guru prajabatan, terutama dalam tuntutan pelaksanaan Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL). Sudah merupakan rahasia umum bahwa pendidikan guru tatap muka juga mendapatkan kesulitan dalam mencari sekolah latihan dan membimbing para mahasiswa

dalam latihan-latihan PPL. Banyaknya mahasiswa yang memerlukan latihan PPL, di samping enggannya sekolah menerima para calon guru ini untuk berlatih di sekolahnya, serta kurangnya tenaga pembimbing, merupakan masalah yang serius untuk diatasi. Pendidikan guru tatap muka yang relatif memiliki dosen yang memadai dalam berbagai disiplin ilmu serta sekolah yang dekat dengan kampusnya masih mempunyai masalah dalam pelaksanaan PPL, apalagi pendidikan guru jarak jauh yang jumlah mahasiswanya sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Dengan memfokuskan diri pada pendidikan dalam jabatan, pendidikan jarak jauh mampu mengatasi kondisi seperti di atas. Tempat latihan bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya adalah sekolahnya sendiri, bahkan kelasnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena semua mahasiswa FKIP-UT adalah para guru yang sudah mengajar. Kelas atau sekolahnya sendiri merupakan laboratorium bagi para guru untuk mencobakan berbagai gagasan inovatif yang diperolehnya selama mengikuti pendidikan guru jarak jauh. Para supervisor yang akan membantu mereka dalam berlatih dapat direkrut dari para guru senior yang terdapat di sekolah tersebut atau di sekitarnya. Inilah yang merupakan alasan yang kuat bagi FKIP-UT untuk menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Di samping faktor sekolah latihan, tentu masih banyak faktor lain yang membuat fokus FKIP-UT terletak pada pendidikan dalam jabatan. Sistem belajar yang tidak mengenal istilah putus sekolah, membuat para mahasiswa, yang juga sibuk dengan tugasnya sebagai guru, merasa tidak terancam. Mereka dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan dan waktu belajar yang tersedia. Bagi mereka yang memang mempunyai potensi dan waktu yang memadai, masa studi yang diperlukan mungkin cukup singkat, namun, para guru yang sangat sibuk dan hanya memiliki kemampuan sedang-sedang saja, mungkin memerlukan waktu studi yang lebih panjang.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Program pendidikan guru di FKIP-UT makin lama makin berkembang. Kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan tenaga guru telah membuat FKIP-UT mengembangkan berbagai program pendidikan guru yang inovatif sesuai dengan kebutuhan lapangan, mulai dari program sertifikat, diploma, sampai sarjana, bahkan program pascasarjana. Contoh program pendidikan guru yang inovatif yang telah dikembangkan oleh FKIP-UT, antara lain adalah Program Penyetaraan Diploma III (D-III) PGSM, tahun 1992, 1993, 1997, 1998; Program Guru Rumpun Bidang Studi (PGRBS) pada tahun 1995; dan Program Sertifikasi Guru Bidang Studi (PSGBS) pada tahun 1997 (Winataputra, 1999). Kiprah FKIP-UT ini membuktikan bahwa pendidikan guru jarak jauh memang mampu menjalankan fungsi dalam peningkatan kualifikasi dan kualitas guru. Kepercayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk ijin pembukaan Program S1 PGSD bagi FKIP-UT pada tahun 2002 merupakan satu indikator tambahan, bahwa pendidikan guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT memang layak untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru.

Sampai dengan bulan April 2005, FKIP-UT memiliki lima jurusan, yang semuanya mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru. Jurusan Ilmu Pendidikan menaungi Program Pendidikan Guru SD (PGSD), baik jenjang D-II, maupun jenjang S1 serta program Akta Mengajar. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni menaungi program Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris, baik untuk guru-guru SMP maupun SMA, pada jenjang S1. Jurusan Pendidikan MIPA menaungi program Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Matematika. Selanjutnya, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial menaungi Program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), serta Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Akhirnya, Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan menaungi Program D-II PGSD Penjaskes,

yaitu program peningkatan kualifikasi dan kualitas bagi guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD.

Dengan diberlakukannya struktur baru di Universitas Terbuka mulai akhir April 2005, jurusan di FKIP-UT juga mengalami perubahan, meskipun jumlahnya tetap lima. Jurusan yang berubah adalah Jurusan Ilmu Pendidikan, yang kini hanya menaungi Program Akta Mengajar, sementara satu program Ilmu Pendidikan yang lain sedang dikembangkan. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Program Pendidikan Guru TK, bersama dengan Program Pendidikan Guru Olah Raga melebur menjadi satu jurusan, yang disebut sebagai Jurusan Pendidikan Dasar. Sementara itu, tiga jurusan yang lain tidak mengalami perubahan. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan ini tidak mengubah fungsi FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan guru dalam jabatan.

#### **4. Satuan Pendidikan**

Universitas Terbuka (UT) adalah universitas negeri ke-45 di Indonesia. Oleh karena itu, semua program pendidikan yang diselenggarakan oleh UT, termasuk program pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh FKIP-UT, merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan SK Mendikbud No. 0854/U/1989 tentang pengadaan dan penyetaraan guru SD, maka semua pendidikan guru (termasuk pendidikan guru bagi guru SD) berada pada jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh FKIP-UT merupakan satuan pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, penghargaan terhadap lulusan UT, termasuk lulusan pendidikan guru jarak jauh sama dengan penghargaan yang diberikan kepada lulusan universitas negeri lainnya.



## **B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri**

### **1. Kurikulum**

Sebagaimana halnya pendidikan guru yang diselenggarakan melalui pertemuan tatap muka, pengembangan kurikulum pendidikan guru jarak jauh juga diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, pengembangan draf, serta revidi dan revisi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum program studi dalam pendidikan guru jarak jauh memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari studi kelayakan sampai dengan siapnya kurikulum tersebut diimplementasikan. Faktor lain yang menyebabkan waktu pengembangan kurikulum (dengan diimplementasikannya kurikulum tersebut) menjadi lebih panjang adalah kesiapan bahan ajar. Berbeda dengan pendidikan guru tatap muka yang setiap saat dapat mengembangkan dan mengimplementasikan/memberlakukan kurikulum baru, kurikulum pendidikan guru jarak jauh tidak mungkin diimplementasikan jika bahan ajar belum siap.

Terkait dengan fungsi sebagai pendidikan dalam jabatan, kurikulum pendidikan guru jarak jauh selalu mengacu kepada kurikulum pendidikan prajabatan. Lebih-lebih ketika UT ditugaskan menyelenggarakan Program Penyetaraan D-II PGSD, maka Kurikulum PGSD Prajabatan harus dijadikan acuan. Namun sayangnya, ketika pertama kali program ini diluncurkan, Kurikulum PGSD Prajabatan belum ada, karena dibuka pada waktu yang sama. Oleh karena itu, ketika pengembangan Kurikulum DII PGSD Penyetaraan 1990, tidak ada Kurikulum D-II PGSD Prajabatan yang dapat dijadikan acuan. Untuk mengatasi hal tersebut, kurikulum dikembangkan dengan melibatkan dosen-dosen dari LPTK calon penyelenggara D-II PGSD Prajabatan. Dengan cara ini, Kurikulum

D-II PGSD Penyetaraan diharapkan akan setara dengan Kurikulum D-II PGSD Prajabatan.

Di samping mengacu kepada kurikulum program prajabatan, Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh juga mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti Standar Nasional Pendidikan, serta otonomi dan demokratisasi pendidikan. Berbagai pembaharuan dalam kurikulum dan pembelajaran seperti pendekatan kompetensi yang melahirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kreatif dan produktif, pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, juga diakomodasi dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh. Selain itu, perkembangan pendidikan yang terjadi pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah seperti perubahan kurikulum sekolah, perubahan nama satuan pendidikan, sistem pembelajaran, juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh. Para mahasiswa pendidikan guru jarak jauh adalah para guru yang sedang aktif mengajar di berbagai jenjang sekolah. Oleh karena itu, mereka seyogyanya diakrabkan dengan berbagai perkembangan pendidikan yang terjadi di berbagai satuan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka mencerna pembaharuan tersebut lebih cepat dari rekan-rekannya yang tidak sedang melanjutkan studi.

Tidak berbeda dengan Kurikulum Pendidikan Guru Tatap Muka, kurikulum utuh setiap program studi dalam Pendidikan Guru Jarak Jauh terdiri dari komponen-komponen berikut.

1. Visi, misi, dan tujuan Program Studi.
2. Profil/Kompetensi Lulusan.

3. Struktur Kurikulum, yang merupakan daftar mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan, lengkap dengan bobot sks masing-masing dan sebarannya per semester.
4. Deskripsi Mata Kuliah, untuk semua mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi. Setiap deskripsi mata kuliah memuat kompetensi yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tersebut, pengalaman belajar yang harus dihayati mahasiswa untuk mencapai kompetensi tersebut, topik/materi kajian, serta prosedur dan alat evaluasi yang akan digunakan untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa.
5. Pedoman Umum Pembelajaran, memuat berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang akan diterapkan dalam pembelajaran, yang memungkinkan mahasiswa menguasai kemampuan keguruan yang diharapkan.
6. Pedoman Umum Penilaian, memuat prosedur, jenis, dan alat penilaian yang secara umum digunakan untuk menilai kompetensi para calon guru dalam berbagai bidang.

Dari segi struktur kurikulum, sesuai dengan rumpun kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru (Depdiknas, 2002), yaitu: (1) menguasai substansi dan metodologi disiplin ilmu serta materi kurikuler dalam kurikulum sekolah, (2) memahami perkembangan peserta didik, (3) menguasai pembelajaran yang mendidik, serta (4) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan; maka mata kuliah dalam Program Pendidikan Guru Jarak Jauh dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok Mata Kuliah Bidang Ilmu (MKBI), kelompok mata kuliah Kependidikan dan Keguruan (MKKK), dan kelompok mata kuliah Kepribadian dan Keprofesionalan (MKPP). Ketiga kelompok mata kuliah ini mengakomodasi mata kuliah yang menunjang pencapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain, sebagaimana yang tertuang dalam

SK Mendiknas No. 045 /2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Di samping kurikulum utuh setiap program studi, kurikulum di FKIP-UT juga terdiri dari paket-paket untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas guru sesuai dengan permintaan dari lapangan. Paket-paket ini dapat merupakan paket yang menjurus kepada program sertifikat dan bahkan dapat ditransfer jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, guru yang mengambil program sertifikat dapat mentransfer kredit yang telah dimiliki, jika ingin melanjutkan ke jenjang S1.

## **2. Bahan Belajar Mandiri**

Bahan ajar untuk setiap mata kuliah dikembangkan secara sistematis melalui pengembangan Rancangan Mata Kuliah (RMK) yang mencakup Peta Kompetensi dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Peta kompetensi yang merupakan hasil dari Analisis Instruksional (AI) menggambarkan kompetensi umum yang akan dicapai dalam satu mata kuliah, serta kompetensi khusus yang mendukung tercapainya kompetensi umum tersebut. Di samping itu, peta kompetensi juga menggambarkan hubungan antarkompetensi khusus sesuai dengan hakikat setiap kompetensi khusus tersebut. Hubungan ini akan menjurus kepada urutan kompetensi yang harus lebih dahulu dikuasai dalam satu mata kuliah. GBPP adalah garis besar program yang merupakan peta yang menggambarkan kompetensi, pengalaman belajar, materi kajian, dan evaluasi untuk dituangkan dalam modul-modul bahan ajar.

Dengan berpedoman pada GBPP, para penulis bahan ajar akan mengembangkan materi pokok mata kuliah dalam bentuk modul. Setiap modul merupakan materi pokok yang bersifat pembelajaran mandiri dan lengkap, sehingga mampu membimbing mahasiswa untuk belajar mandiri. Pembelajaran mandiri berarti bahan belajar

ini mampu membuat mahasiswa belajar secara mandiri, mengatur kecepatan belajarnya, menilai pencapaiannya sendiri, serta berdasarkan hasil penilaian tersebut, memutuskan untuk mengulang kembali atau meneruskan ke bahan belajar berikutnya. Lengkap berarti segala sumber belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tersedia dalam bahan belajar tersebut. Oleh karena itu, berbagai media seperti media cetak, media audio, dan video merupakan suplemen dari modul-modul tertentu, sehingga mahasiswa mendapatkan materi yang memadai yang akan menunjang pencapaian kompetensi yang diharapkan. Di samping itu, sumber-sumber yang diperkirakan dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa, juga dicantumkan dalam bahan belajar.

Dengan melihat jumlah waktu yang diperlukan untuk menguasai kompetensi yang dituntut dalam sebuah modul, maka bobot sebuah modul ditentukan sama dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sks. Ini berarti, bahan belajar mata kuliah yang berbobot dua sks akan terdiri dari enam modul; untuk mata kuliah tiga sks, sembilan modul dan seterusnya. Sebuah modul terdiri dari 40–60 halaman untuk bidang noneksakta, dan 30–40 halaman untuk mata kuliah eksakta. Dengan pembatasan jumlah halaman seperti itu, diharapkan bahan belajar akan memuat berbagai contoh dan latihan yang mempermudah mahasiswa mencerna berbagai konsep, khususnya konsep-konsep yang akan diterapkan langsung oleh para guru, ketika melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kemampuan keguruan memang harus dibentuk melalui latihan yang dirancang secara sistematis dan bertahap. Contoh-contoh yang tepat dengan jumlah yang memadai akan mempermudah para mahasiswa untuk melaksanakan latihan, baik secara mandiri, maupun dalam kelompok.

Para pengembang bahan ajar jarak jauh berasal dari berbagai LPTK tatap muka yang cukup terkenal di negeri ini, di samping tenaga akademik dari FKIP-UT. Agar para penulis dapat

mengakomodasi karakteristik pendidikan guru jarak jauh dalam menulis bahan ajar, maka pada awal penulisan diadakan semacam pelatihan singkat dalam menulis bahan ajar mandiri. Bahan ajar yang sudah selesai ditulis kemudian ditelaah oleh tenaga akademik yang berasal dari LPTK yang berbeda. Hasil telaah merupakan masukan bagi penulis untuk memperbaiki/menyempurnakan bahan ajar. Dengan cara ini, bahan ajar mandiri yang dikembangkan untuk para mahasiswa pendidikan guru jarak jauh akan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi substansi maupun cara penyajian. Pada kenyataannya, bahan ajar dalam bentuk modul ini banyak dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tatap muka. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator bahwa bahan ajar mandiri yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka dapat diterima/dipakai oleh perguruan tinggi lain.

Selain bahan ajar cetak, bahan ajar mandiri juga terdiri dari bahan ajar berupa video dan audio, serta bahan ajar "*online*". Bahan ajar audio dan video pada dasarnya merupakan suplemen dari bahan ajar cetak, sedangkan bahan ajar *online* dikaitkan dengan tutorial *online* yang diperuntukkan mahasiswa yang mempunyai akses ke internet. Pada dasarnya semua jenis bahan ajar dikembangkan dengan langkah-langkah yang sama dan bersumber dari RMK. Jika bahan ajar cetak yang disertai dengan multimedia berupa audio dan video merupakan bahan ajar utama yang wajib diikuti/dipelajari oleh mahasiswa, maka bahan ajar *online* merupakan bahan ajar alternatif, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mempunyai akses ke internet. Jalinan kerja sama yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh dengan penyedia layanan internet, diharapkan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang mampu memanfaatkan bahan ajar *online*. Di samping itu, juga tersedia bahan ajar dalam bentuk Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) secara terbatas.

## **C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional**

### **1. Proses Pembelajaran**

Proses pembelajaran merupakan komponen yang paling krusial dalam pendidikan karena proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan benar akan membuahkan hasil belajar yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada pihak yang mempertanyakan apakah proses belajar dalam pendidikan guru jarak jauh mampu menjamin terbentuknya kompetensi guru (Kompas, 9 Mei 2005, hal. 9). Sikap apatis terhadap pendidikan guru jarak jauh lebih banyak didasarkan pada kurangnya informasi tentang proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh. Hal ini menyebabkan munculnya anggapan, bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh hanya dilakukan dengan membaca modul dan melalui internet, sebagaimana yang terungkap dalam Kompas, 9 Mei 2005 tersebut. Padahal sebenarnya, sesuai dengan hakikat pembentukan kemampuan keguruan, proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh sangat beragam, seperti yang diuraikan berikut ini.

Sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh, maka pendidikan guru jarak jauh pun mengutamakan kemampuan mahasiswa untuk belajar mandiri, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UT belum siap mengubah cara belajar tatap muka menjadi cara belajar jarak jauh (Kadarko, 2000). Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa mahasiswa UT mempunyai potensi untuk belajar mandiri, hanya belum mampu bertanggung jawab secara penuh (Puspitasari & Islam, 2003). Hasil-hasil penelitian tersebut tentu merupakan alat pemacu bagi penyelenggara program untuk mengupayakan agar para mahasiswa

pendidikan guru jarak jauh cepat mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar mandiri.

Sejalan dengan tuntutan belajar mandiri, para mahasiswa yang sedang aktif bertugas sebagai guru, diharapkan mampu mengatur dirinya dalam belajar dan melaksanakan tugas sebagai guru. Mereka diharapkan mampu menguasai berbagai kemampuan keguruan melalui berbagai kegiatan, seperti mempelajari materi pokok yang disediakan dalam bentuk modul, membentuk kelompok belajar untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui dalam mencerna isi modul, mengikuti tutorial, baik yang bersifat wajib, maupun atas prakarsa sendiri, mengikuti kegiatan praktikum, serta mengikuti kegiatan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) yang merupakan muara dari program pendidikan guru. Setiap kegiatan belajar mempunyai tuntutan dan ciri khas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang akan dikuasai, sebagaimana yang terungkap dalam deskripsi berikut ini. Namun perlu dicatat bahwa kualitas setiap kegiatan belajar akan saling mempengaruhi keberhasilan mahasiswa. Misalnya, kegiatan mahasiswa dalam membaca modul akan mempengaruhi kualitas kegiatan tutorial yang diikuti, demikian pula kegiatan tutorial akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PKM dan PKP.

#### a. *Membaca Modul*

Kegiatan membaca modul mata kuliah yang sedang diambil menuntut mahasiswa mengerjakan berbagai tugas dan latihan yang dapat dilakukan secara mandiri. Bahan belajar yang disiapkan dalam bentuk modul memang dikembangkan untuk memenuhi prinsip: “mandiri”, yang berarti mahasiswa mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan menggunakan modul yang disediakan. Mereka mampu menilai kemajuannya dalam penguasaan kompetensi yang



dituntut, baik melalui pengerjaan tugas dan latihan, maupun melalui pengerjaan tes formatif. Jika perlu, mereka dapat berdiskusi dengan teman-temannya atau berkonsultasi dengan para tutor. Terdapat modul-modul tertentu yang dilengkapi dengan media audio dan/atau video yang terkait dengan kompetensi yang didukung oleh modul tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu mengatur diri untuk mendengarkan atau menyaksikan media yang disediakan tersebut. Tanpa melakukan kegiatan itu, mahasiswa tidak mungkin menguasai kompetensi yang diharapkan.

Meskipun kegiatan membaca modul merupakan kegiatan mandiri yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mengikuti tutorial, namun pengalaman menunjukkan banyak mahasiswa yang belum membaca modul ketika datang ke tempat tutorial. Tidak semua mahasiswa mampu mengubah gaya belajar tradisional menjadi gaya belajar mandiri. Oleh karena itu, layanan belajar baik yang bersifat akademik maupun nonakademik harus disediakan bagi mahasiswa (Simpson, 2000). Sering terjadi mahasiswa hanya membaca modul ketika ujian sudah di ambang pintu. Gaya belajar seperti ini tentu tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan karena membaca modul bukan seperti membaca dongeng yang dapat dilahap dalam waktu singkat. Membaca modul memerlukan kesungguhan dan kecermatan agar konsep-konsep yang dipelajari dapat dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan jarak jauh, lebih-lebih mahasiswa pendidikan guru, harus membuat jadwal belajar dan menaati jadwal tersebut. Disiplin terhadap diri sendiri sangat menentukan keberhasilan mahasiswa, di samping juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang sedang melanjutkan studi. Di sinilah pentingnya layanan belajar seperti yang sudah diungkapkan di depan.

### *b. Belajar Kelompok*

Belajar dalam kelompok merupakan salah satu modus dalam pembelajaran jarak jauh. Berbeda dengan belajar kelompok pada pendidikan tatap muka yang diprakarsai oleh dosen, belajar kelompok dalam pendidikan jarak jauh harus diprakarsai oleh mahasiswa sendiri dengan cara membentuk kelompok belajar. Anggota kelompok biasanya terdiri dari para guru yang mengambil program/paket yang sama, misalnya Program D-II PGSD, paket 1, Program Pendidikan Bahasa Inggris, atau Program Akta Mengajar. Satu faktor lagi yang dipertimbangkan dalam membentuk kelompok adalah jarak tempat tinggal/tempat mengajar yang memungkinkan mereka berkumpul tanpa menempuh jarak yang terlalu jauh. Setiap kelompok belajar harus menjadwalkan pertemuan kelompok sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Untuk mahasiswa yang sedang bertugas sebagai guru, tempat dan waktu pertemuan kelompok dapat diatur sehingga tidak mengganggu jadwal mengajar mereka. Kegiatan dalam kelompok dapat berupa mengidentifikasi kesulitan dalam modul yang dipelajari, mendiskusikan cara pemecahan kesulitan/masalah yang ditemui, mengerjakan tugas/latihan dalam modul, menghimpun masalah yang tidak dapat diatasi oleh kelompok, mendengarkan/menyaksikan audio atau video yang merupakan suplemen modul disertai dengan diskusi.

Untuk mengefektifkan kegiatan kelompok belajar, pengelola pendidikan guru jarak jauh dapat memfasilitasi pembentukan kelompok belajar dan kegiatannya dengan berbagai cara. Salah satu di antara cara tersebut adalah menyediakan tempat pertemuan, membantu menyusun jadwal kegiatan, menyediakan atau merekomendasikan tutor jika diperlukan, dan barangkali mengadakan pertemuan secara teratur. Fasilitasi ini akan sangat bermakna, lebih-lebih pada awal kegiatan karena tanpa fasilitasi akan sulit bagi mahasiswa untuk mengadakan pertemuan. Setelah kegiatan

kelompok berjalan, fasilitasi dapat dikurangi sambil mendorong kelompok untuk mengatur dirinya sendiri.

### c. *Tutorial*

Perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan dari “berpusat pada guru” menjadi “berpusat pada siswa” (Brojonegoro, 1999), membuat pendidikan guru jarak jauh harus berpikir keras untuk mewujudkan paradigma baru tersebut. Lebih-lebih bagi para guru yang harus juga mewujudkan paradigma tersebut di kelasnya, kegiatan pembelajaran dalam bentuk tutorial menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Meskipun tutorial tidak diwajibkan bagi mahasiswa jarak jauh, namun bagi pendidikan guru, tutorial memegang peran sentral. Di samping sebagai ajang pertemuan antarmahasiswa dan tutor yang mampu meningkatkan motivasi belajar (Flinck & Flinck, 1990), tutorial juga berperan penting dalam peningkatan kemampuan mahasiswa menguasai kompetensi yang dituntut oleh setiap mata kuliah. Kemampuan bekerja sama, kemampuan berdiskusi, serta kemampuan memecahkan masalah merupakan kemampuan yang dapat dibentuk melalui tutorial dan terkait erat dengan pembentukan berbagai kemampuan mengajar. Melalui tutorial, mahasiswa diharapkan sempat menghayati belajar dengan menggunakan berbagai strategi yang dirancang dan diterapkan oleh tutor dengan pendekatan “berpusat pada siswa”. Pada gilirannya, penghayatan tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh para mahasiswa di kelas masing-masing. Menyadari pentingnya fungsi tutorial dalam pembentukan kemampuan keguruan, FKIP-UT memberi perhatian khusus pada pelaksanaan tutorial dalam berbagai modus.

Tutorial diselenggarakan dalam berbagai modus, seperti tutorial tatap muka, tutorial tertulis, tutorial melalui radio, dan tutorial

online. Pada umumnya, tutorial yang paling diminati oleh para guru adalah tutorial tatap muka. Hal ini dapat dipahami, karena berbagai kemampuan/kesempatan yang diuraikan di atas dapat diperoleh dari tutorial tatap muka. Kenyataan ini tidak bertentangan pula dengan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa pertemuan tatap muka bukan merupakan pantangan dalam pendidikan jarak jauh (Suparman, 1992). Meskipun demikian, modus tutorial yang lain juga mendapat perhatian dari mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang karena kondisi tempat tinggalnya tidak mungkin mengikuti tutorial tatap muka.

Dalam tutorial tatap muka diberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di bawah supervisi para tutor. Tugas tersebut diperiksa oleh tutor dan akan ikut menentukan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Pada awalnya, tutorial tatap muka seperti ini disebut sebagai: Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus (TTM-RK) yang mempersyaratkan pertemuan sebanyak delapan kali untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Dalam perkembangan selanjutnya, TTM-RK ini hanya disebut sebagai tutorial tatap muka (TTM), namun prinsip penyelenggaraannya sama. Khusus untuk mahasiswa pendidikan guru, TTM bersifat wajib diikuti untuk mata kuliah tertentu. Persyaratan ini diberlakukan mengingat pentingnya interaksi langsung dalam pembentukan kemampuan keguruan.

Untuk mengikuti tutorial, khususnya tutorial tatap muka, mahasiswa wajib mempelajari materi bahan ajar yang akan ditutorialkan. Mereka diharapkan datang ke tempat tutorial dengan berbagai pertanyaan atau masalah yang akan dibahas dalam pertemuan tutorial. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka, dalam tutorial para tutor tidak akan banyak menceramahkan materi yang terdapat dalam modul, tetapi lebih banyak membimbing mahasiswa memecahkan masalah yang ditemukan ketika

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

mempelajari modul. Oleh karena itu, akan sangat sia-sia jika mahasiswa mengharapkan akan mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep yang terdapat dalam modul. Namun, hal ini tidak berarti bahwa konsep-konsep utama tidak menjadi pembahasan. Konsep-konsep tersebut tetap penting untuk dibahas, namun pembahasannya tidak hanya berasal dari tutor, tetapi juga dari mahasiswa.

Tutorial tertulis, tutorial radio, dan tutorial *online*, yang menurut Holmberg (1995) disebut sebagai tutorial jarak jauh disediakan terutama bagi mereka yang tidak mungkin mengikuti tutorial tatap muka. Meskipun layanan jarak jauh memang merupakan ciri khas/primadona dari pendidikan jarak jauh seperti yang terungkap dalam tulisan Taylor (2003), namun kenyataan yang terjadi dalam pendidikan guru jarak jauh berbeda. Tutorial tertulis dan radio banyak diikuti oleh mahasiswa FKIP, namun tidak sebanyak tutorial tatap muka, sedangkan tutorial *online*, pesertanya sangat terbatas. Penyebab dari kondisi ini mungkin kurangnya akses para guru ke internet, di samping mungkin keterampilan menggunakan internet belum dikuasai oleh banyak guru.

#### *d. Praktikum dan Praktek*

Kegiatan praktikum dan/atau praktek dipersyaratkan oleh berbagai mata kuliah dalam Kurikulum Pendidikan Guru. Tujuan kegiatan ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dituntut oleh mata kuliah, baik keterampilan untuk dirinya sendiri, maupun keterampilan yang akan diajarkan kepada para siswa, ketika mahasiswa ini melaksanakan tugas sebagai guru. Mahasiswa pendidikan guru jarak jauh wajib melakukan kegiatan praktikum atau praktek di bawah bimbingan instruktur atau secara mandiri. Untuk keperluan ini, disediakan kit, seperti Kit IPA, Kit Musik, dan Kit Olah Raga, kaset atau video, sesuai dengan

karakteristik mata kuliah, serta panduan praktek dan praktikum yang akan memandu mahasiswa ketika akan mengikuti kegiatan tersebut. Tempat kegiatan mungkin di laboratorium sekolah atau perguruan tinggi terdekat, di kelompok belajar, atau di tempat lain yang ditentukan. Sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan praktek/praktikum dan sekaligus untuk menilai kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut, para mahasiswa diwajibkan membuat laporan.

#### e. *PKM dan PKP*

Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) merupakan mata kuliah yang menekankan pada praktek. Mengajar merupakan satu kemampuan yang sangat kompleks yang hanya mungkin dibentuk melalui latihan yang sistematis dan bertahap. Kegiatan PKM akan memungkinkan mahasiswa mengalami latihan pemantapan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya secara bertahap dan sistematis, seperti latihan penguasaan konsep keterampilan dasar mengajar, berlatih menerapkannya dalam bentuk simulasi, serta mendiskusikan hasil latihan tersebut. Hasil diskusi digunakan sebagai masukan bagi latihan berikutnya. Dengan demikian, PKM akan mampu membuat guru mengajar lebih baik, sehingga kualitas proses belajar siswa pun diharapkan akan meningkat.

Pada awalnya, banyak pihak yang menentang kehadiran mata kuliah PKM dalam Program Pendidikan Guru dalam jabatan. Mereka beranggapan bahwa para guru yang menjadi mahasiswa tidak perlu latihan mengajar lagi, karena mereka sudah menjadi guru. Bagi para guru yang sudah mengajar ini, yang diperlukan adalah penguasaan bidang studi serta pengetahuan lain yang akan membuat wawasan mereka menjadi semakin luas. Tentu saja argumentasi demikian itu dipatahkan oleh konsep dasar kemampuan

keguruan, yang tidak hanya mempersyaratkan penguasaan bidang studi/bidang ilmu, tetapi juga mempersyaratkan peningkatan kemampuan dalam pemahaman tentang peserta didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, yang keempatnya merupakan rumpun kompetensi seorang guru, seperti yang tercantum dalam SKGK-SDMI (Depdiknas, 2002). Di samping itu, peningkatan kualifikasi guru tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan guru, namun lebih penting dari itu adalah meningkatkan kemampuan profesional sebagai guru. Pada gilirannya, peningkatan kemampuan profesional ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa yang akan bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan.

Istilah Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL) yang digunakan dalam pendidikan Program Pendidikan Guru Prajabatan *tidak* digunakan dalam Program Pendidikan Guru dalam jabatan karena tidak seluruh tahap-tahap latihan PPL berlaku bagi mahasiswa dalam jabatan. Istilah PPL lebih sesuai untuk program prajabatan. Sebagai gantinya, digunakan istilah Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) karena para mahasiswa memang sudah memiliki kemampuan mengajar, sehingga yang perlu diprogramkan adalah memantapkan/meningkatkan kemampuan tersebut. Dengan demikian, PKM memang sudah memperhitungkan pengalaman guru dalam mengajar dan tidak memperlakukan mereka sebagai calon guru yang belum pernah mengajar.

PKP memungkinkan para guru mengembangkan diri menjadi guru profesional yang mampu memperbaiki kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Para mahasiswa yang mengambil Program S1 Kependidikan dipersyaratkan mengambil program ini sebagai persyaratan keluaran (*exit requirement*). Di bawah bimbingan supervisor, secara mandiri

mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya, menganalisis dan merumuskan masalah, merencanakan tindakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, dan menyusun laporan. Dengan perkataan lain, mahasiswa melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelasnya sendiri. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan terbiasa menemukan kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang dikelolanya dengan melakukan refleksi profesional, dan kemudian mengembangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam pendidikan guru jarak jauh ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain komitmen mahasiswa, penyelenggara, dan mitra kerja pendidikan jarak jauh. Rencana yang baik jika dilaksanakan tanpa komitmen yang tinggi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Perlu pula disadari bahwa sesuai dengan hakikatnya, pendidikan jarak jauh sangat mengandalkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik dalam bentuk tutorial biasa, praktek dan praktikum, maupun dalam PKM dan PKP. Dalam kaitan ini, FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan guru jarak jauh berupaya mendesain program pembelajaran secara realistis, namun tetap berpegang pada kemungkinan meningkatkan kemampuan keguruan para mahasiswa. Artinya, pengembang program harus benar-benar yakin bahwa program yang dirancang akan mampu membuat para mahasiswa meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai guru; sehingga mereka mampu mengelola pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan / informasi, tetapi yang juga peduli terhadap pembentukan karakter bangsa sebagai perwujudan dari tercapainya tujuan utuh pendidikan (Raka Joni, 1983, 1991, dan 2005 ).



## 2. Evaluasi dan Ujian Nasional

Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi, mahasiswa pendidikan guru diwajibkan mengikuti berbagai prosedur penilaian. Kemampuan keguruan merupakan kemampuan yang kompleks; sehingga prosedur dan alat evaluasi harus diprogramkan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, ketercapaian kompetensi mahasiswa diakses melalui berbagai prosedur, yaitu: (a) Tugas Mandiri (TM), (b) Tugas Tutorial, (c) Kegiatan Praktek dan Praktikum, (d) ujian PKM dan PKP, (e) Ujian Akhir Semester (UAS), serta (f) Tugas Akhir Program (TAP). Sebagai perguruan tinggi negeri, penyelenggaraan ujian dilakukan oleh lembaga sendiri. Dengan perkataan lain, tidak ada ujian nasional yang biasanya diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi. Berikut ini diuraikan pengertian, karakteristik, dan bobot sumbangan dari setiap jenis perangkat penilaian.

### a. *Tugas Mandiri (TM)*

Sesuai dengan namanya, tugas mandiri (TM) dikerjakan secara mandiri oleh para mahasiswa. Tugas ini berupa tes, yang umumnya dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dan diberikan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap sekitar 50% materi modul bahan ajar setiap mata kuliah. Dengan demikian, fungsi TM dapat disamakan dengan ujian tengah semester untuk mahasiswa di perguruan tinggi tatap muka. Dari segi bentuk tes yang digunakan, dapat disimak bahwa kemampuan yang dinilai dengan TM sebagian besar berkisar pada penguasaan konsep yang bersifat kognitif.

### b. *Tugas Tutorial*

Tugas tutorial merupakan tugas yang diberikan dalam tutorial, khususnya dalam tutorial tatap muka; meskipun tugas ini dapat juga

diberikan dalam tutorial *online* dan tutorial tertulis. Tugas diberikan dan dinilai oleh tutor. Pada umumnya, tugas ini menuntut mahasiswa mendemonstrasikan kemampuannya dalam menganalisis dan memecahkan masalah dan/atau menunjukkan keterampilannya dalam mengerjakan sesuatu yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diambil. Tugas tutorial diberikan dan dinilai oleh tutor pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh dari tutorial yang menjadwalkan pertemuan sebanyak delapan kali. Nilai tugas tutorial mempunyai kontribusi tertentu terhadap nilai akhir mata kuliah, yaitu antara 10% s.d. 30%.

c. *Kegiatan Praktek dan Praktikum*

Kegiatan praktek dan praktikum dinilai melalui laporan yang dibuat oleh mahasiswa dengan menggunakan format yang telah disediakan. Laporan ini dinilai dan mempunyai kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah yang mempersyaratkan praktek/praktikum. Besar kontribusi berkisar antara 10% s.d. 40%, tergantung dari karakteristik mata kuliah.

d. *Ujian PKM dan PKP*

Ujian PKM ditempuh oleh mahasiswa D-II PGSD yang sudah mendapat rekomendasi layak mengikuti ujian dari para supervisor. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan setiap mahasiswa yang mengikuti ujian PKM telah menjalani latihan yang memadai serta telah diasumsikan menguasai kompetensi yang diharapkan. Dalam ujian PKM, mahasiswa diwajibkan mengajar dua kali dengan bidang studi/topik yang berbeda. Setiap mahasiswa diuji oleh dua orang penguji yang menilai persiapan (rencana pembelajaran) dan pelaksanaan pembelajaran.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Ujian PKP diikuti oleh mahasiswa program S1, baik S1 PGSD maupun S1 Kependidikan Bidang Studi. Nilai seorang mahasiswa dalam PKP ditentukan oleh dua komponen, yaitu nilai laporan dan nilai ujian PKP. Laporan dibuat oleh mahasiswa atas perbaikan yang sudah dilakukannya di kelasnya sendiri; sedangkan ujian PKP mempersyaratkan mahasiswa mengajarkan dua bidang studi/topik yang berbeda yang sudah pernah menjadi fokus perbaikan ketika mahasiswa berlatih memperbaiki pembelajaran melalui PTK. Nilai akhir mahasiswa dalam PKP ditentukan oleh nilai laporan dan nilai ujian.

e. *Ujian Akhir Semester*

Ujian akhir semester (UAS) ditempuh oleh mahasiswa untuk mata kuliah yang memang mempersyaratkan UAS. Pada umumnya, UAS diberikan dalam bentuk soal pilihan ganda, yang dapat dikombinasikan dengan tes jawaban singkat, serta diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Nilai UAS pada dasarnya memberikan kontribusi terbesar bagi nilai akhir mata kuliah.

f. *Tugas Akhir Program*

Sebelum menyelesaikan program, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian komprehensif tertulis (UKT), yang bertujuan untuk menguji wawasan/kemampuan mahasiswa menerapkan berbagai konsep dalam program studi yang diambilnya. Belakangan, UKT diubah menjadi Tugas Akhir Program (TAP), yang diberlakukan mulai masa registrasi 2004.2 bagi FKIP dan 2006.1 bagi UT. TAP merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang menuntut kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam bidang masing-masing. Kemampuan ini diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang dihasilkan dari bimbingan TAP

yang wajib diikuti oleh mahasiswa, serta ujian yang menuntut mahasiswa mampu memecahkan masalah pembelajaran yang dikemas dalam kasus-kasus. TAP dapat disetarakan dengan Tugas Akhir yang diberikan di perguruan tinggi tatap muka.

## **D. Tenaga Kependidikan**

### **1. Jenis dan Kualifikasi**

Sesuai dengan UU No. 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah semua personil yang membantu penyelenggaraan pendidikan; sedangkan tenaga pendidik adalah mereka yang melaksanakan tugas mengajar, mendidik, dan melatih. Sehubungan dengan itu, maka tenaga kependidikan di FKIP-UT, sebagai penyelenggara pendidikan guru jarak jauh terdiri dari tenaga kependidikan nonpendidik yaitu tenaga administrasi dan teknisi; serta tenaga pendidik, yaitu dosen, supervisor, dan instruktur. Karena mahasiswa pendidikan guru jarak jauh tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka tenaga kependidikan ini juga tersebar di seluruh pelosok tanah air, yaitu di 35 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Berikut ini diuraikan sepiintas kilas tentang masing-masing tenaga.

#### *a. Tenaga Kependidikan Nonpendidik*

Tenaga kependidikan nonpendidik terdiri dari para staf administrasi, mulai dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, para teknisi, pengemudi, sampai dengan para tenaga pembantu seperti penerima dan pengantar surat. Oleh karena itu, kualifikasi bagi tenaga ini bervariasi, mulai dari sarjana (bahkan ada yang Magister), Diploma III, sampai dengan lulusan SMA.

*b. Tenaga Pendidik*

Pada dasarnya, tenaga pendidik pada pendidikan guru jarak jauh dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga tetap yang memang status kepegawaiannya berada di FKIP-UT, serta tenaga dari berbagai lembaga pendidikan yang merupakan mitra kerja UT. Tenaga pendidik di FKIP-UT terdiri dari dosen, supervisor PKM & PKP, dan instruktur. Dosen FKIP-UT terdiri dari dosen tetap dan semua dosen dari berbagai lembaga pendidikan guru yang menjadi penulis modul-modul FKIP-UT. Sesuai dengan persyaratan dosen bagi perguruan tinggi, maka kualifikasi dosen merentang dari lulusan S1 sampai dengan S3, sedangkan khusus bagi dosen FKIP-UT maka para dosen ini harus mempunyai latar belakang kependidikan. Dari segi kualifikasi pendidikan, diharapkan kualifikasi pendidikan dosen minimal S2 (Magister) dalam bidang yang relevan dengan pendidikan guru. Supervisor PKM dan PKP berasal dari tenaga dosen dan guru yang sudah mempunyai pengalaman mengajar minimal lima tahun dan mampu membimbing para mahasiswa dalam melaksanakan PKM dan PKP. Tenaga instruktur adalah mereka yang membimbing mahasiswa untuk melakukan praktek dan praktikum. Persyaratan bagi instruktur adalah mempunyai kemampuan profesional dalam bidang yang sesuai (seperti instruktur Olah Raga, Seni Tari, Seni Musik), serta mampu membimbing mahasiswa melakukan praktek/praktikum dalam bidang tersebut. Dari persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa tenaga instruktur sebagian besar berasal dari luar FKIP-UT, baik dari lembaga pendidikan guru, maupun tenaga profesional di luar lembaga pendidikan guru.

## 2. Rekrutmen

Pada dasarnya, rekrutmen tenaga kependidikan di FKIP-UT dapat dibedakan atas dua kelompok. Pertama, rekrutmen tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri di Universitas Terbuka; dan kedua rekrutmen tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri di Universitas Terbuka. Kelompok pertama, direkrut berdasarkan peraturan pengangkatan pegawai negeri, dengan persyaratan tambahan mempunyai latar belakang kependidikan bagi dosen; sedangkan kelompok kedua direkrut melalui rekomendasi dari mitra kerja sama (misalnya perguruan tinggi negeri setempat). Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala UPBJJ yang akan menerbitkan surat penugasan bagi tenaga yang diterima.

## 3. Status

Seperti sudah tersirat dalam uraian di atas, status tenaga kependidikan di FKIP-UT dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, yang berstatus sebagai pegawai negeri di UT, dan kedua tenaga di luar FKIP-UT, khususnya tenaga pendidik, yaitu dosen, supervisor, dan instruktur. Para tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri di UT merupakan pegawai tetap yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan pegawai negeri lainnya; sedangkan tenaga pendidik yang berasal dari luar UT merupakan tenaga tidak tetap yang penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan tenaga di FKIP-UT. Misalnya, para penulis modul yang juga berstatus sebagai dosen bagi mata kuliah yang ditulisnya, hanya diberi tugas ketika ada kebutuhan untuk menulis modul, serta para supervisor PKM ditugaskan ketika kegiatan PKM/PKP dan ujian PKM/PKP sedang berlangsung.

#### 4. Deskripsi Tugas

Tenaga kependidikan di FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh, khususnya tenaga dosen, mempunyai tugas yang berbeda dari tugas-tugas dosen yang bekerja pada pendidikan guru tatap muka. Secara umum, memang tugas dosen adalah mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, secara khusus, tugas dosen di UT tidak hanya terbatas pada tugas-tugas yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mengerjakan tugas-tugas pengelolaan, seperti memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa yang akan menempuh ujian komprehensif atau Tugas Akhir Program (TAP), alih kredit, mengelola pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, atau melakukan penyapaan kepada mahasiswa yang pasif. Di samping tugas-tugas di fakultas, dosen FKIP-UT juga ditugaskan di berbagai unit di UT, seperti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI) dengan unit-unit pendukungnya, bahkan dapat pula ditugaskan di Rektorat dan Program Pascasarjana, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Di luar itu, masih ada lagi tugas-tugas yang diemban oleh dosen FKIP-UT, seperti melatih tutor, memantau ujian ke berbagai daerah, bahkan menjadi tutor, jika diperlukan. Karena adanya tugas-tugas tersebut, di samping tugas pokok sebagai dosen (seperti menulis modul dan soal, memeriksa ujian), maka waktu untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itulah, sesuai dengan esensi tugas-tugas seorang dosen pendidikan guru jarak jauh, maka jam kerja dosen di FKIP atau di UT sama seperti tenaga kependidikan lainnya, yaitu lima hari dalam seminggu, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.15.

## E. Sarana dan Prasarana

Seperti program pendidikan pada umumnya, program pendidikan guru jarak jauh mempersyaratkan adanya sarana dan prasarana. Secara umum, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 20/2003) Pasal 45 ayat (1) digariskan bahwa *"Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik"*. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP 19/2005), yaitu harus memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut PP-SNP 19/2005, Pasal 1 Butir 8, yang berbunyi *"Standar sarana dan prasarana adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan informasi"*. Mengenai standar sarana dan prasarana, dalam PP-SNP 19 /2005 secara normatif diatur dalam Pasal 42 s.d. 48, yang berlaku untuk semua satuan pendidikan dalam semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk yang diselenggarakan dengan sistem pendidikan jarak jauh.

Di antara pasal-pasal tersebut, yang secara substantif terkait pada penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara spesifik adalah yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 42 PP-SNP 19 /2005, yakni butir-butir ketentuan yang berkenaan dengan peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi.



Dalam Pasal 42 PP-SNP 19/2005 tersebut dikemukakan pada ayat (1) bahwa secara umum *"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan"*. Lebih rinci mengenai sarana dan prasarana umum pendidikan digariskan pada ayat (2): bahwa *"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan"*. Jika dilihat dengan cermat ternyata di dalam PP-SNP 19/2005 tersebut, sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh belum diatur secara khusus. Hal ini tidaklah berarti bahwa tidak ada rambu-rambu normatif bagi pendidikan jarak jauh. Secara lebih spesifik, sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh tersebut diatur dalam Pasal 112 RPP Penyelenggaraan Pendidikan (versi 15 Agustus 2005). Pada ayat (1) RPP tersebut dikemukakan bahwa: *"Sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan jarak jauh harus berbasis teknologi komunikasi dan informasi, dan media lain serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan standar keamanan komunikasi dan informasi"*. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa: *"Penyelenggaraan satuan pendidikan jarak jauh berkewajiban untuk secara mandiri mengembangkan sistem operasional dengan dukungan jaringan radio, jaringan TV, jaringan komputer, dan/atau jaringan komunikasi dan informasi lainnya."* Semua ketentuan itu, baik yang bersifat umum dan relevan maupun yang bersifat khusus, memberikan rambu-rambu normatif kepada UT

dalam mengadakan dan menata sarana dan prasarana pendidikannya.

UT sebagai satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi jarak jauh memiliki prasarana fisik yang terdapat di kantor Pusat UT Pondok Cabe dan Kantor-kantor UPBJJ-UT di seluruh Indonesia. Di Kantor Pusat UT terdapat fasilitas lahan dan pekarangan, gedung Rektorat, *Operation Room* dan ruang sidang senat, gedung 4 fakultas, gedung lembaga yang terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Lantai II) dan Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (Lantai 1), gedung Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Monitoring, dan gedung Biro Administrasi Umum dan Keuangan, gedung Perpustakaan, studio Produksi Bahan Ajar Noncetak, gedung percetakan, gudang bahan ajar dan bahan penunjang akademik lainnya, gedung serba guna, mesjid, gedung Pelayanan Umum, Klinik, Wisma, sejumlah ruang sidang, sarana olah raga, dan areal konservasi alam dan lingkungan, yang pada saat ini masih dalam proses pembangunan. Setiap gedung dilengkapi dengan perlengkapan kerja, baik jumlah maupun kualitasnya yang sangat memadai. Sebagai contoh di Kantor Pusat UT terdapat lebih dari 1500 komputer yang berfungsi baik dengan rasio satu komputer untuk 3 staf. Sedang pada setiap UPBJJ-UT terdapat fasilitas ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang kerja, ruang kelas tempat tutorial, gudang modul, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolah raga, dan tempat beribadah.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan guru jarak jauh Universitas Terbuka, prasarana yang dimiliki dan/atau didayagunakan sampai dengan saat ini mencakup prasarana yang dimiliki UT dan yang dimiliki oleh unsur di luar UT yang secara kolaboratif didayagunakan oleh UT. Yang dimiliki UT adalah Kantor Pusat UT dengan seluruh kelengkapannya, di Pondok Cabe, Pamulang,

Tangerang, 35 Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) dengan seluruh kelengkapannya yang tersebar pada 30 Propinsi di seluruh Indonesia. Yang dimiliki pihak-pihak di luar UT tetapi secara kolaboratif didayagunakan oleh UT adalah Kantor POS - PT Pos Indonesia, Kantor BRI, Warnet, Perpustakaan Wilayah/Daerah, Perpustakaan dan Laboratorium PTN Pembina, Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta, dan prasarana publik lainnya.

Prasarana pendidikan yang terdapat di Kantor Pusat UT yang bersifat kelembagaan dengan fungsi layanan lintas unit dan berfungsi substansial dalam penyiapan dan penyelenggaraan program pendidikan guru jarak jauh adalah Pusat Produksi Bahan Ajar Cetak (PPBAC), Pusat Produksi Bahan Ajar Noncetak (PPBANC), Pusat Pengujian (Pusjian), Pusat Komputer (Puskom), Pusat Layanan Bahan Ajar (Puslaba) yang secara struktural berada di bawah Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI) dan Pusat Layanan Pustaka yang secara organisatoris berada di bawah Rektor. PPBAC bertugas *"...menyelenggarakan fungsi: penyiapan naskah master bahan ajar cetak dan melaksanakan koordinasi produksi dan penerbitan bahan ajar cetak"*. (Pasal 40 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Bahan ajar cetak digunakan sebagai bahan belajar utama. PPBANC bertugas *"...menyelenggarakan fungsi: penyiapan naskah master dan melaksanakan koordinasi produksi bahan ajar noncetak."* (Pasal 44 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Bahan ajar noncetak digunakan sebagai bahan belajar pendukung. Pusjian bertugas: *"...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran serta pengelolaan bank soal; pelaksanaan penggandaan dan koordinasi pengiriman bahan ujian; pelaksanaan koordinasi pelaksanaan ujian; pelaksanaan pengolahan hasil ujian"*. (Pasal 48 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Puskom bertugas: *"...menyelenggarakan fungsi: "...pelaksanaan pengembangan dan aplikasi program; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data dan*

*informasi; pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi; pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana.” (Pasal 52 Kepmendiknas No. 123/O/2004). Puslaba bertugas: “...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan penggudangan bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya; pelaksanaan pengiriman bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya; dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi distribusi bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya”. (Pasal 56) Kepmendiknas No 123/O/2004) Pusat Layanan Pustaka bertugas “...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengadaan dana pengolahan bahan pustaka; pelaksanaan pemeliharaan dan pemberian layanan serta pendayagunaan bahan pustaka; pelaksanaan penyebaran informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat” (Pasal 103 Kepmendiknas No 123/O/2004). Layanan pustaka tersebut disediakan khususnya bagi para mahasiswa untuk menunjang proses belajar di UT dan untuk para dosen dalam penulisan bahan ajar dan memperluas wawasannya.*

Sampai saat ini, UT mempunyai dukungan berbagai jaringan (Rektor UT,2005:28), yaitu jaringan radio dengan RRI Programa Nasional Jakarta untuk penyiaran program pendidikan; jaringan TV dengan PT Jaring Data Interaktif untuk penyelenggaraan program pendidikan melalui Q-Channel; Komitel untuk akses layanan program pendidikan melalui Warnet; PT Telkom dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pembelajaran; PT Indosat untuk layanan informasi melalui SMS; dan PT Bhakti Wasantara Net untuk pelaksanaan program melalui Wasantara Net. Prasarana lainnya yang dimiliki oleh unsur di luar UT yang secara kolaboratif didayagunakan oleh UT adalah Kantor Pos dari PT Pos Indonesia (Persero), PT BRI (Persero), Perpustakaan Wilayah/Daerah, Perpustakaan dan Laboratorium PTN Pembina, Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta, ruang kelas tempat tutorial dan

ujian serta prasarana publik lainnya. Kantor Pos dari PT Pos Indonesia didayagunakan dalam registrasi calon mahasiswa dan mahasiswa serta pengiriman bahan belajar dan bahan ujian beserta seluruh kelengkapannya. Kantor BRI didayagunakan dalam pelaksanaan registrasi calon mahasiswa dan mahasiswa. Warnet didayagunakan dalam pelayanan tutorial *online* dan komunikasi maya lainnya antara mahasiswa dengan Kantor Pusat UT, seperti mengecek hasil ujian. Perpustakaan Wilayah/Daerah dan Perpustakaan PTN Pembina didayagunakan oleh mahasiswa dalam memperkaya pengalaman belajarnya melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan modul sebagai bahan belajar utama. Laboratorium PTN Pembina didayagunakan dalam praktikum mahasiswa untuk mata kuliah IPA. Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta didayagunakan dalam praktikum IPA, pemantapan kemampuan mengajar (PKM), ujian PKM, dan tutorial tatap muka.

Untuk keperluan pelaksanaan PKM D-II PGSD/D-II Guru Penjaskes SD, sekolah-sekolah (SD) tempat para mahasiswa FKIP-UT bekerja secara operasional digunakan sebagai tempat masing-masing mahasiswa melakukan PKM di bawah bimbingan supervisor PKM dan kepala sekolah. Sedang untuk ujian PKM digunakan sekolah-sekolah, yang oleh UPBJJ-UT setempat sebagai penanggung jawab ujian PKM, dianggap cukup memadai untuk tempat Ujian PKM. Selain itu, untuk keperluan praktikum IPA bagi mahasiswa Diploma III IPA, digunakan Laboratorium SMP/SMA tertentu atau Lab IPA di LPTK/PTN Pembina setempat atas dasar kemitraan. FKIP juga sudah merintis Klinik Pembelajaran bagi para guru/mahasiswa sebagai wahana dan sarana untuk membantu para guru meningkatkan kualitas kinerjanya secara profesional sebagai guru.

Sedangkan prasarana publik lainnya, seperti Gedung Pertemuan digunakan dalam acara Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).

## **F. Pengelolaan, Pendanaan, dan Pengawasan**

Jika dilihat secara umum, keseluruhan pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan guru di UT merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh *modus tunggal*. Secara substantif-akademik dan programatik-kurikuler pendidikan guru di UT berada di dalam lingkungan dan merupakan tanggung jawab FKIP, namun secara institusional-manajerial berada di dalam konteks sistem manajemen UT. Hal ini terjadi, karena FKIP merupakan salah satu fakultas di lingkungan universitas dan sebagai implikasi logis dari karakter manajemen PTJJ *modus tunggal*. Hal itu pula yang membedakan pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan guru di UT dengan penyelenggaraan pendidikan guru tatap muka di IKIP dan STKIP dahulu. Oleh karena itu, sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan guru yang diterapkan di UT sejak berdiri tahun 1984 sampai dengan saat ini, menerapkan sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan yang khas/unik.

Keunikan itu tumbuh karena secara fundamental-sistemik pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan suatu sistem yang memiliki subsistem: siswa dan kegiatan instruksional, pengembangan bahan ajar, reproduksi bahan ajar, distribusi bahan ajar, media komunikasi, pengujian, logistik, dan jaminan kualitas. Masing-masing subsistem itu mempunyai fungsi khusus yang diwadahi oleh lembaga khusus, tetapi bergerak dalam konteks sistemik, sinergis dan utuh serta bersifat nasional (Suparman dan Zuhairi, 2004:225-231). Oleh

karena itu, sistem pengelolaan, pendanaan dan pengawasan pendidikan guru di UT juga terpola secara sistemik, sinergis, dan utuh serta bersifat nasional. Kondisi ini secara legal sangat dimungkinkan karena UU Sisdiknas 2003 pun dengan tegas menggariskan bahwa *"Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya"* (Pasal 50 ayat (6)). Ketentuan dasar tersebut dipertegas lagi oleh PP-SNP 2005, yang mengelaborasi lebih jauh bahwa *"Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi"* (Pasal 49 ayat (2)). Salah satu prinsip dasar pengelolaan yang juga ditegaskan dalam PP-SNP 2005 adalah bahwa *"Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel"* (Pasal 54 ayat(1)).

Secara sistemik-kelembagaan, keseluruhan fungsi dari subsistem itu diwadahi oleh struktur organisasi dan tatakerja UT. Setelah berkiprah selama 20 tahun lebih, sistem kelembagaan UT awal yang dibangun pada saat berdirinya tahun 1984, pada tahun 2005 telah berkembang menjadi UT dengan sistem kelembagaan baru, seperti dituangkan dalam Keputusan Mendiknas RI Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka. Berdasarkan Kepmen tersebut, UT terdiri atas: Rektor dan Pembantu Rektor; Senat Universitas; Fakultas (FKIP, FEKON, FISIP, FMIPA); Dosen; Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang di dalamnya terdapat Pusat Keilmuan, Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem, Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Instruksional, Pusat Pengabdian Masyarakat); Lembaga Pengembangan Bahan Ajar,

Ujian dan Sistem Informasi (LPBAUSI) yang di dalamnya terdapat Pusat Produksi Bahan Ajar Cetak (PPBAC), Pusat Produksi Bahan Ajar Noncetak (PPBANC), Pusat Pengujian (Pusjian), Pusat Komputer (Puskom), dan Pusat Layanan Bahan Ajar (Puslaba); Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas); Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Monitoring (BAAPM); Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); Pusat Layanan Pustaka; Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ); dan Dewan Penyantun. Di dalam konteks sistemik-kelembagaan itulah pendidikan guru jarak jauh UT dikelola secara sistemik.

Sebagaimana terkandung dalam konsep umum manajemen, pengelolaan pendidikan tinggi UT mencakup kegiatan *perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian*. Dalam konteks itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan guru dilakukan dalam kerangka sistemik, yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi jarak jauh UT. Kegiatan pengelolaan tersebut berkenaan dengan aspek *substansi dan proses akademik, kegiatan operasional, dan pemanfaatan sumber daya pendidikan*. Pengelolaan substansi dan proses akademik mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan pengembangan bahan ujian. Secara institusional kewenangan akademik atas pengelolaan substansi dan proses akademik pendidikan guru berada di bawah tanggung jawab FKIP, yang secara operasional dilaksanakan di dalam masing-masing program studi dengan koordinasi oleh masing-masing jurusan.

Secara substantif-pedagogis, perencanaan substansi dan proses akademik pendidikan guru berbasis dan bermuara pada pengembangan kompetensi guru profesional. Oleh karena itu, kurikulum dan bahan ajar pendidikan guru dirancang sebagai wahana pedagogik untuk mengembangkan kemampuan memahami peserta didik, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik,



kemampuan kepribadian sebagai guru, kemampuan menguasai materi ajar bidang studi dalam kurikulum sekolah, kemampuan memahami secara mendalam konsep dan metodologi disiplin keilmuan yang menaungi substansi kurikulum, dan kemampuan sosial guru sebagai anggota masyarakat. Orientasi rancangan substansi dan proses akademik itu secara substantif-normatif sesuai dengan hakikat kompetensi guru sebagai pendidik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 PP-SNP 2005, yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pengelolaan pendidikan guru seperti itu dikenal dengan nama *competency-based teacher professional development* (Houston:1960, Levis:1978) , yang pada awal tahun 1980-an di Indonesia dikenal dengan nama *pendidikan guru berbasis kompetensi* (PGBK).

Pengembangan bahan ujian untuk program pendidikan guru diarahkan pada pengembangan berbagai prosedur dan alat evaluasi penguasaan kompetensi melalui penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa-guru sesuai dengan bidang studinya. Sampai saat ini penilaian penguasaan kompetensi menggunakan prosedur tes tertulis untuk penguasaan mata kuliah, observasi klinis kemampuan pembelajaran , dan tugas akhir program (TAP) untuk program Sarjana (S1). Sedangkan sebagai alat evaluasi, digunakan tes objektif dan uraian, Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), dan Naskah TAP. Dengan prosedur dan alat penilaian kompetensi tersebut, diyakini bahwa lulusan pendidikan guru FKIP-UT akan mampu mencerminkan penguasaan kompetensinya sebagai guru profesional dalam bidang studinya masing-masing.

Dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar cetak, dan bahan ujian FKIP-UT memanfaatkan pakar substansi dan/atau pendidikan/ pembelajaran dari berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UNM), dan Universitas Negeri Padang (UNP). Hubungan kemitraan dengan semua perguruan tinggi tersebut, khususnya dalam merekrut calon penulis dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, FKIP-UT mendapat dukungan operasional dari masing-masing UPBJJ setempat. Kemitraan pemanfaatan kepakaran lainnya, yang kini sudah dirintis, yakni mulai tahun 2005 adalah dalam pemeriksaan ujian akhir semester uraian pada beberapa UPBJJ sentra. Pemanfaatan kepakaran dari berbagai perguruan tinggi terkemuka tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas bahan ajar dan bahan ujian agar memenuhi standar akademik dan pedagogik proses pendidikan guru. Dengan demikian, secara programatik lulusan FKIP-UT dapat menunjukkan kapasitas akademik dan kinerja profesional yang sama dengan lulusan program pendidikan guru lain di luar UT.

Pengelolaan kegiatan operasional pendidikan guru mencakup pengelolaan produksi dan distribusi bahan ajar dan bahan ujian, pengelolaan bantuan belajar, pengelolaan pelaksanaan ujian, pengelolaan hasil ujian dan pemberian sertifikasi. Pengelolaan produksi bahan ajar dilakukan melalui kegiatan penyiapan master oleh PBAC dan penyiapan master dan penggandaan bahan ajar noncetak oleh PBANC, penetapan tiras bahan ajar cetak dan noncetak dan penetapan pencetakan bahan ajar cetak di Percetakan UT atau Percetakan rekanan UT dan penetapan penggandaan bahan ajar noncetak oleh PBANC. Pengelolaan bantuan belajar mencakup penyiapan model dan perangkat tutorial tatap muka untuk mahasiswa program D-II dan Sarjana (S1) PGSD dan D-II PGTK, serta tutorial *online* dan tutorial rancangan khusus (TTRMK) untuk program pendidikan guru bidang studi SMP/SMA/SMK. Kegiatan pengelolaan lainnya adalah pemetaan kelompok belajar di seluruh

wilayah UPBJJ, penetapan perekrutan dan penugasan tutor dan instruktur sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk masing-masing program, penyiapan pembekalan para tutor inti di pusat atau daerah dan penyiapan pembekalan tutor daerah pada masing-masing wilayah UPBJJ-UT.

Pengelolaan ujian mencakup pemetaan tempat ujian dan lokasi ujian di seluruh Indonesia, penetapan jenis dan jumlah naskah ujian yang harus disiapkan sesuai dengan jumlah mahasiswa yang meregistrasi ujian/ujian ulang, penataan jenis dan jumlah naskah ujian untuk setiap UPBJJ, penyiapan dan pengemasan bahan pendukung ujian. Perencanaan pengelolaan hasil ujian mencakup penetapan pola pemeriksaan lembar jawaban ujian (LJU) soal objektif pada Pusat Komputer dan pola pemeriksaan ujian uraian di FKIP-UT dan Sentra UPBJJ, serta penetapan prosedur pengolahan hasil ujian dan penerbitan hasil ujian oleh Pusat Pengujian. Kegiatan dalam rangka sertifikasi lulusan mencakup penyiapan kelengkapan penetapan kelulusan, termasuk di dalamnya penyiapan formulir ijazah dan transkrip, penjadwalan yudisium kelulusan, penyiapan keputusan kelulusan, penyiapan acara wisuda di kantor UT Pusat dan upacara penyerahan ijazah di UPBJJ-UT.

Pengelolaan sumber daya pendidikan guru termasuk dalam pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan UT secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan konsep pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya operasi, investasi dan biaya personal sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 PP-SNP 2005, yang dapat direncanakan oleh UT sebagai penyelenggara pendidikan guru adalah biaya operasi yang langsung dikelola sendiri. *Biaya operasi* tersebut mencakup penerimaan dana masyarakat yang diperoleh dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa atau disediakan sepenuhnya atau sebagian oleh lembaga pemberi beasiswa atau pemberi subsidi;

penerimaan dana di luar SPP seperti penjualan bahan ajar cetak dan noncetak, penetapan penerimaan dan pengeluaran UT per tahun oleh Senat UT. Rencana tersebut kemudian diajukan kepada Departemen Keuangan melalui departemen Pendidikan Nasional guna mendapatkan pengesahan untuk direalisasikan pada setiap tahunnya. Di luar biaya operasi tersebut juga terdapat biaya operasi lain yang secara rutin disiapkan oleh Pemerintah dalam bentuk gaji dosen dan tenaga administratif UT dan juga gaji dosen perguruan tinggi lain yang secara paruh waktu didayagunakan oleh UT sebagai penulis modul, penulis naskah multi media, tutor, instruktur praktikum, supervisor dan penguji Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP untuk Program S1 PGSD)/Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM untuk D-II PGSD/PGTK) dan sebagai pengawas dan panitia ujian akhir semester. Sedang *biaya investasi* adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah atau UT secara mandiri dalam bentuk *sarana dan prasarana pendidikan* yang digunakan di lingkungan UT dan di luar UT dalam rangka pelaksanaan program pendidikan guru UT. Sementara itu *biaya personal pendidikan* yang dikeluarkan oleh setiap mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya dan penghasilan yang hilang sebagai bagian dari biaya yang hilang karena kesempatan terambil oleh belajar (*opportunity cost*), tidak termasuk dalam pembahasan biaya pendidikan yang direncanakan oleh UT sebagai lembaga penyelenggara pendidikan guru. Biaya personal adalah istilah teknis yang digunakan dalam Pasal 62 PP-SNP 19/2005 beserta penjelasannya, yang mencakup antara lain “*pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya*” yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap mahasiswa. Oleh karena itu, secara kelembagaan tidak menjadi bagian dari pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan UT. Jadi biaya personal tidak sama dengan biaya untuk personil atau pegawai. Biaya

personil atau pegawai, seperti gaji PNS termasuk dalam biaya operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pengendalian dalam rangka penjaminan mutu pendidikan guru dilakukan di UT dengan menerapkan sistem penjaminan kualitas (SIMINTAS). Upaya pengendalian dilakukan dengan menetapkan prosedur operasional baku untuk semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan guru pada FKIP UT. Prosedur operasional baku tersebut dituangkan dalam sejumlah Pedoman Simintas. Hal-hal yang dikendalikan secara sistemik antara lain pengembangan bahan ajar cetak dan noncetak; pengembangan bahan tutorial dan pengelolaan tutorial tatap muka dan tutorial *online*; pengembangan bahan ujian dan pengelolaan ujian; dan praktik pemantapan kemampuan profesional sebagai guru. Pengendalian itu dimaksudkan untuk menjamin diperolehnya produk akademis (modul, bahan ujian, bahan tutorial dll) melalui prosedur yang baku sesuai konsep dan prinsip teknologi pembelajaran.

## **G. Pendirian dan Akreditasi**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT sebagai lembaga pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan didirikan sebagai bagian integral dari Universitas Terbuka yang didirikan pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1984 dan diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 4 September 1984. Seperti dikutip oleh Wahyono (2004:115-116) dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres tersebut, dinyatakan bahwa struktur organisasi UT terdiri atas:

- Rektor dan Pembantu rektor
- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Biro Administrasi Umum
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika dan Pengolahan Data
- Pusat Pengolahan pengujian
- Unit Program Belajar Jarak Jauh.

Jika dilihat dari latar belakangnya, UT didirikan untuk menjawab dua masalah besar dalam dunia pendidikan, yakni rendahnya mutu guru dan terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi. Seperti diangkat oleh Wahyono (2004:1003) “Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat, sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D-II untuk SLTP dan S1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah karena adanya kendala biaya dan waktu”. Dari argumentasi tersebut jelas sekali bahwa pendirian FKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan dalam lingkungan UT dilakukan karena adanya *kebutuhan objektif yang mendesak untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru* serta adanya *komitmen nasional dan kemauan politik* untuk mengatasinya sebagai bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa gagasan pendirian UT, yang di dalamnya ada FKIP, mulai dari tahap embrional-gagasan sampai dengan dibukanya UT pada tanggal 4 September 1984 berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu di bawah pimpinan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto sebagai Mendikbud dengan pelaksana perintisan oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Setijadi, yang

kemudian menjadi Rektor pertama UT (Wahyono, 2004: 106-107). Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa program pendidikan guru yang sampai saat ini dibina dan dikembangkan oleh FKIP-UT merupakan wujud dari komitmen negara untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Walaupun program pendidikan guru di FKIP-UT lahir sebagai perwujudan dari komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terutama hal itu merupakan kemauan politik negara, tetapi di dalam perkembangannya, kelembagaan dan program pendidikannya tetap harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus diikuti adalah adanya kebutuhan setiap program pendidikan tinggi untuk mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kecuali untuk program D-II PGSD, semua program sarjana (S1) guru bidang studi Matematika dan IPA; Bahasa Indonesia dan Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial yang sudah berusia antara 10-20 tahun itu telah mendapatkan akreditasi resmi. Program D-II PGSD kini sedang dalam proses akreditasi. Hal ini berarti hampir semua program pendidikan guru di lingkungan UT secara akademik dan manajerial telah memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan guru pada jenjang pendidikan tinggi dan lulusannya memiliki kualifikasi dan mutu yang memadai.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi, yakni UU Sisdiknas 2003 Pasal 60 tentang Akreditasi dengan ketentuan turunannya PP-SNP 2005, yaitu Pasal 86, semua program dan/atau satuan pendidikan pada semua jenjang, tentunya termasuk program pendidikan guru di FKIP-UT pada saatnya harus memperoleh akreditasi baru dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan PP-SNP 2005. Menurut

ketentuan itu, titik berat akreditasi tersebut terletak pada penentuan kelayakan program. Jika dijabarkan lebih jauh, kelayakan tersebut secara konseptual mencakup kelayakan yang merujuk pada standar nasional pendidikan, yakni memenuhi *standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan* (Pasal 2 ayat (1) PP-SNP 2005). Bagi UT, yang mempunyai Visi menjadi salah satu PTJj unggulan di Asia tahun 2010 dan PTJj unggulan di dunia tahun 2020, upaya untuk meningkatkan kelayakan program sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) PP-SNP 2005 tersebut bukanlah suatu orientasi baru karena selama ini UT, termasuk untuk program pendidikan guru yang dikelolanya peningkatan kelayakan program selalu dilakukan secara terus menerus. Khusus dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian serta pengelolaan ujian, pada tahun 2005 UT telah memperoleh Akreditasi Internasional dari *International Council of Distance Education (ICDE)* dan pada saat ini UT sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan ISO 9001 dalam pengelolaan layanan distribusi bahan ajar dan bahan ujian. Secara *idiil-substantif* upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT, termasuk *penyelenggaraan program pendidikan tinggi untuk para pendidik dan tenaga kependidikan*. □



## Daftar Pustaka

- Brodjonegoro, S.S. (1999). *Management Change in University toward 21<sup>st</sup> Century: The Indonesian Policy. International Seminar Proceedings*. Jakarta: Higher Education Project, Ministry of Education and Culture
- Chivore, B. R. S. (1992). *Pre-Service Teacher Education at a Distance: The Case of Zimbabwe*. <http://www1.worldbank.org/distd/Policy/Program/teach-02.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (1991). ). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (2004) *Keputusan Mendiknas RI Nomor. 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Panduan Tutorial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2002). *Panduan Penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2004). *Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2002). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD – MI, Program Pendidikan D II PGSD*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2005). *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Flinck, R. & Flinck, A. W. (1990). *Handbook for tutor*. Colombo: Department of Distance Education.
- Gagne, R. M.. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Holmberg, B. (1995). *Theory and Practice of Distance Education*. New York: Routledge.
- Kadarko, W. (2000). Kemampuan Belajar Mandiri dan Faktor-faktor Psikososial yang Mempengaruhinya: Kasus Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 1, No. 1, pp. 27-41.
- Kuliah Jarak Jauh Tidak Menjamin Kompetensi Guru. **Kompas**. 9 Mei 2005, hal. 9.
- Puspitasari, K. A. & Islam, S. (2003). Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa dan Calon Potensial Mahasiswa pada Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 4, No. 1, pp.16-31.
- Raka Joni, T. (1983). *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.
- . (1991). *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Guru*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Ditjen Dikti.
- . (2005). *Pembelajaran yang Mendidik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik*. Tidak diterbitkan.

Republik Indonesia(1984) *Keputusan Presiden Nomor. 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka*, Jakarta

\_\_\_\_\_ (2003) *Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas

\_\_\_\_\_ (2005) *Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas

\_\_\_\_\_ (2005) *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas

Rektor UT (2005) *Laporan Rektor UT Periode 2001-2005*, Jakarta: Universitas Terbuka

Simpson, O. (2000). *Supporting Students in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page Limited.

Suparman, A. (1992). *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU – PPAI Universitas Terbuka.

Suparman, A. dan Zuhairi, A. (2004) *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pusbit UT

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0854/U/1989 tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru SD.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Taylor, J. (2003). *Fifth Generation Distance Education*. Available at: <http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/>

Wahyono, E. dkk (2004) *Universitas terbuka: Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Pusbit-UT

Wardani, I G. A. K. (2003). *Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM): Buku Materi Pokok*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- . (1999). Peningkatan Kualifikasi Guru dan Program Penyetaraan. dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal: 127 -135. Jakarta: Universitas Terbuka.
- .; Siti Juliaha; & Ngadi Marsinah. (2004). *Pemantapan Kemampuan Profesional (Panduan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, Udin, S. (1999). Aspek-aspek Inovatif dalam Pendidikan Guru dengan Sistem Belajar Jarak Jauh. Dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal: 136-153. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brodjonegoro, S.S. (1999). Mangement Change in University toward 21<sup>st</sup> Century: The Indonesian Policy. *International Seminar Proceedings*. Jakarta: Higher Education Project, Ministry of Education and Culture
- Chivore, B. R. S. (1992). *Pre-Service Teacher Education at a Distance: The Case of Zimbabwe*. <http://www1.worldbank.org/distd/Policy/Program/teach-02.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (1991). ). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Panduan Tutorial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2002). *Panduan Penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2004). *Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

- . (2002). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD – MI, Program Pendidikan D II PGSD*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2005). *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Flinck, R. & Flinck, A. W. (1990). *Handbook for tutor*. Colombo: Department of Distance Education.
- Gagne, R. M.. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Holmberg, B. (1995). *Theory and Practice of Distance Education*. New York: Routledge.
- Kadarko, W. (2000). Kemampuan Belajar Mandiri dan Faktor-faktor Psikososial yang Mempengaruhinya: Kasus Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 1, No. 1, pp. 27-41.
- Kuliah Jarak Jauh Tidak Menjamin Kompetensi Guru. Kompas. 9 Mei 2005, hal. 9.
- Puspitasari, K. A. & Islam, S. (2003). Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa dan Calon Potensial Mahasiswa pada Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 4, No. 1, pp.16-31.
- Raka Joni, T. (1983). *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.

- .(1991). *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Guru*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Ditjen Dikti.
- .(2005). *Pembelajaran yang Menididik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik*. (Naskah tidak diterbitkan).
- Simpson, O. (2000). *Supporting Students in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Suparman, A. (1992). *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU – PPAI Universitas Terbuka.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0854/U/1989 tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru SD.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Taylor, J. (2003). *Fifth Generation Distance Education*. Available at: <http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardani, I G. A. K. (2003). *Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM): Buku Materi Pokok*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- .(1999). Peningkatan Kualifikasi Guru dan Program Penyetaraan. dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal: 127 -135. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wardani, I G. A. K. ; Siti Julæha; & Ngadi Marsinah. (2004). *Pemantapan Kemampuan Profesional (Panduan)*. Jakarta: Universitas.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Winataputra, Udin, S. (1999). Aspek-aspek Inovatif dalam Pendidikan Guru dengan Sistem Belajar Jarak Jauh dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal:136-153. Jakarta: Universitas Terbuka.

